

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai Negara dan pembangunan nasional. Karena pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang paling besar, pengelolaan terhadap penerimaan pajak harus dilaksanakan dengan baik sehingga pembangunan nasional yang diharapkan dapat terwujud. Sebagai perwujudan terhadap pembangunan nasional tersebut, maka diperlukan peran serta rakyat secara aktif dalam bentuk kesadaran membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Ada berbagai jenis pajak dan berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada di tangan Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada di tangan Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan hasil penerimaan Pajak Daerah tersebut akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pajak Negara (Pajak Pusat) terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dan Bea Meterai.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah terdiri dari 5 Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) dan 11 jenis Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), yaitu:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan Pajak Rokok.
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pembangunan Nasional terjadi di segala bidang dan dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia, salah satu contohnya adalah Bandung. Hal ini dapat dilihat dengan semakin berkembangnya sektor-sektor penting, seperti pariwisata dan industri, baik industri besar maupun industri kecil (rumah tangga) dari tahun ke tahun. Perkembangan berbagai sektor penting tersebut berdampak pula terhadap perkembangan bisnis perhotelan di Bandung. Peningkatan jumlah wisatawan yang datang dari masa ke masa mengakibatkan banyak pengusaha mulai melirik bisnis perhotelan karena dianggap memiliki prospek yang bagus untuk di jalankan di Kota Bandung. Dengan banyaknya bisnis perhotelan di Bandung, maka setiap pengusaha

Hotel di harapkan dapat memajukan daerah setempat serta berperan aktif dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan pajak daerah antara lain: **Marina Emanuella (2010)** dengan judul Pengaruh Pengenaan Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung: Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah yang berada di Kota Bandung dan memiliki persentase kontribusi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebesar 37.6% .

Marissa Djunaedi (2008) dengan judul Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kotamadya Bandung Dari Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2006 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung), disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Restoran saat ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah yang berada di Kotamadya Bandung dan memiliki persentase kontribusi sebesar 49.65%.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang penerimaan Pajak Hotel untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung. Apakah terjadi peningkatan yang signifikan pada besarnya kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah mengingat Kota Bandung merupakan salah satu kota wisata. Oleh karenanya peneliti mengambil judul penelitian “**Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung: Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan dan penghitungan Pajak Hotel di Kota Bandung.
2. Berapa besarnya kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.
3. Apakah terdapat pengaruh dari penerimaan Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh dari penerimaan Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan dan penghitungan Pajak Hotel di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari penerimaan Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari penerimaan Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan hasilnya akan dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Bagi penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel.

2. Bagi rekan-rekan mahasiswa

Penulis berharap melalui tulisan ini dapat membantu mahasiswa atau mahasiswi lain jika ingin meneliti tentang Pajak Daerah.

3. Bagi para pengusaha dan masyarakat Kota Bandung

Penulis berharap melalui penelitian ini, para pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa Hotel dan masyarakat yang menggunakan jasa Hotel memahami akan pentingnya penerimaan Pajak Hotel sebagai salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung yang dimanfaatkan untuk pembangunan Kota Bandung.

4. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan bahan evaluasi mengenai besarnya kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Daerah kota Bandung, sehingga pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung akan lebih mengupayakan optimalisasi penerimaan Pajak Hotel sebagai salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah.